

Analisis Dampak Kebijakan Daendels Terhadap Masyarakat Indonesia

Nur Salsabilah Harahap¹ Djumar Yorendi Sumbayak² Nurdilla Ramadhani³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: nursalsabila814@gmail.com¹ djumarsumbayak7@gmail.com²
nurdilaramadhani@gmail.com³

Abstrak

Herman Willem Daendels, yang diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh Louis Bonaparte, tiba di Jawa pada tahun 1808 dan memulai era baru dalam pemerintahan kolonial Belanda. Dalam periode jabatannya dari 1808 hingga 1811, Daendels menerapkan kebijakan sentralisasi kekuasaan, menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan, dan membagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan untuk mempermudah administrasi. Kebijakan-kebijakan ini termasuk pembangunan infrastruktur seperti Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan, yang meskipun revolusioner, juga menimbulkan masalah serius terkait perlakuan terhadap buruh yang bekerja dalam kondisi tidak manusiawi. Selain itu, Daendels berupaya memberantas korupsi dalam birokrasi dengan mengubah status bupati tradisional menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk menganalisis kebijakan Daendels dan dampaknya terhadap perdagangan antar benua serta struktur ekonomi global. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi interaksi Daendels dengan masyarakat lokal dan dampak sosial-ekonomi dari kebijakannya, serta menciptakan ketimpangan struktural antara kekuasaan kolonial dan masyarakat Indonesia. Herman Willem Daendels, who was appointed Governor General of the Dutch East Indies by Louis Bonaparte, arrived in Java in 1808 and began a new era in Dutch colonial administration. During his period of office from 1808 to 1811, Daendels implemented a policy of centralizing power, making Batavia the center of government, and dividing the island of Java into 23 residencies to simplify administration. These policies included the construction of infrastructure such as the Anyer-Panarukan Post Highway, which, although revolutionary, also raised serious problems regarding the treatment of workers working in inhumane conditions. Apart from that, Daendels attempted to eradicate corruption in the bureaucracy by changing the status of traditional regents to paid government employees. This research uses a literature study method to analyze Daendels' policies and their impact on intercontinental trade and the global economic structure. Through qualitative analysis, this research explores Daendels' interactions with local communities and the socio-economic impact of his policies, as well as the creation of structural inequality between colonial powers and Indonesian society.

Kata Kunci: Kebijakan Daendels, Dampak, Masyarakat Lokal, Batavia, Sentralisasi Kekuasaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Herman Willem Daendels, yang diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh Louis Bonaparte, tiba di Jawa pada awal tahun 1808. Ia adalah seorang Jacobin dan pengagum berat Napoleon, bahkan mengibarkan bendera Perancis di Batavia ketika Belanda diintegrasikan ke dalam Kekaisaran Perancis. Daendels lahir di Hattem, Belanda pada tanggal 21 Oktober 1762, sebagai anak dari seorang hakim kota di provinsi Gederland. Ia merupakan anak kedelapan dari tiga belas bersaudara, dan hanya empat diantara saudaranya yang tumbuh dewasa. Perubahan di Hindia Belanda dimulai dengan kedatangan Daendels, yang menandai era baru dalam pemerintahan kolonial Belanda. (Yoel Kurniawan Raharjo, 2024) Pada masa kebijakan Daendels di Indonesia dapat dipahami dari konteks sejarah. Herman W. Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara dari tahun 1808 hingga 1811. Pengangkatannya terjadi saat Belanda dikuasai oleh Perancis, dimana Belanda sedang di bawah

kekuasaan Louis Napoleon, saudara Napoleon Bonaparte. Pada masa itu, Daendels dikenal menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan di Indonesia. Salah satu kebijakan penting yang dijalankan Daendels adalah menjadikan Batavia (sekarang Jakarta) sebagai pusat kekuasaan. Selain itu, ia juga membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Daendels juga membagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan untuk mempermudah administrasi pemerintahan (Arifin, 2021). Pada awal abad ke-19, Pulau Jawa menjadi sasaran utama bagi Inggris yang saat itu sedang menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Gubernur Jenderal Daendels diutus untuk mempertahankan pulau tersebut dari ancaman tersebut. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan stabilitas Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Daendels mencerminkan situasi politik dan keamanan yang berkembang pada masa itu, serta tantangan yang dihadapi dalam melindungi Pulau Jawa. (dan van Heutsz di Belanda & Khusyairi, 2011)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis kebijakan Daendels dan dampaknya terhadap perdagangan antar benua pada era kolonial. Metode ini dipilih karena memberikan peneliti akses ke berbagai sumber literatur historis dan akademik yang relevan, sehingga dapat membangun pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan Daendels, dinamika perdagangan kolonial, serta dampaknya terhadap struktur ekonomi global. Studi kepustakaan ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis data sekunder dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, catatan sejarah, serta teori-teori terkait topik ini. Beberapa literatur utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi karya "Jalan Raya Pos, Jalan Daendels" oleh Pramoedya Ananta Toer, serta teori tentang kolonialisme dan eksploitasi seperti teori World-System oleh Immanuel Wallerstein, yang membantu menjelaskan kebijakan Daendels serta dampaknya pada masa kolonial. Data yang dikumpulkan melalui kajian pustaka ini dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan-hubungan, serta dampak dari kebijakan Daendels di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan historis, penelitian ini mengeksplorasi interaksi Daendels dengan masyarakat lokal, strategi ekspansi ekonomi dan politik yang diterapkan, serta bagaimana kebijakan tersebut menciptakan ketimpangan struktural antara pusat kekuasaan kolonial dan masyarakat Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedatangan Daendels di Jawa

Pada bulan Maret 1807, Daendels memulai perjalanannya menuju Jawa setelah menerima instruksi dari Louis Napoleon untuk menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Agar tidak terdeteksi oleh Inggris yang memblokir hampir semua lautan sebagai balasan terhadap Perancis, Daendels berlayar secara diam-diam. Perjalanan dimulai dari Paris ke Cadiz di Spanyol selatan, lalu ke Maroko dan Kepulauan Canary sebelum membeli kapal Amerika, Virginia, dan melanjutkan perjalanan ke New York. Dari New York, ia akhirnya menumpang kapal Amerika menuju Jawa dengan menggunakan nama istrinya, Van Vlierden. Setelah perjalanan selama sepuluh bulan, Daendels mendarat di Jawa, tepatnya Anyer Banten, pada tanggal 1 Januari 1808. Dari Anyer, Daendels melanjutkan perjalanan darat menuju Batavia untuk bertemu dengan Gubernur Jenderal saat itu, Henricus Albert Weise. Setelah tiga hari perjalanan menuju Batavia, ia disambut oleh Komandan Militer Serang PP. Dupuij, sebelum akhirnya bertemu dengan Gubernur Jenderal Weise pada tanggal 14 Januari 1808. Daendels kemudian resmi menjadi Gubernur Jenderal di Jawa yang diangkat oleh Louis Napoleon atas restu Napoleon Bonaparte. Saat melakukan perjalanan pertamanya di Jawa, Daendels melihat kondisi jalan yang sempit,

berlumpur, dan tidak memadai. Dari pandangan tersebut, ia menyadari bahwa pertahanan Jawa akan rentan jika jalan-jalannya tidak memadai dalam menghadapi serangan Inggris. Hal ini mendorongnya untuk memulai proyek pembangunan jalan yang menjadi prioritas pertamanya saat memulai kekuasaannya (Asian & Studies, 1943).

Pembangunan Jalan Raya Pos, Jalan Daendels dan Benteng Pertahanan Militer

Segera setelah menjabat sebagai Gubernur Jenderal pada 14 Januari 1808, Daendels langsung memulai proyek pertahanan Jawa dengan membangun jalan raya yang menghubungkan ujung barat dan timur pulau. Selain itu, ia juga membangun dua pangkalan armada laut di Teluk Meeuwen (Ujung Kulon) dan Ujung Manari (Gresik). Daendels menargetkan pembangunan jalan raya ini selesai dalam waktu satu tahun. Pembangunan jalan dimulai dari rute Anyer-Batavia, dengan fokus pada perbaikan dan pelebaran jalan yang sudah ada. Waktu tempuh yang awalnya empat hari berhasil dipersingkat menjadi satu hari setelah jalan diperkeras dan dilebarkan. Daendels memilih Anyer sebagai titik awal karena wilayah ini merupakan salah satu pelabuhan tersibuk dan terbesar di Jawa, sehingga berpotensi menjadi titik pendaratan Inggris. Jalan raya ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas pasukan untuk menangkal serangan Inggris. Pembangunan jalan dilanjutkan dari Batavia ke Buitenzorg, Priangan, dan Karangsembung, yang dibiayai oleh pemerintah. Namun, dari Karangsembung hingga Surabaya, pembangunan diserahkan kepada para Bupati karena keterbatasan anggaran pemerintah. Keputusan ini diambil setelah Daendels bertemu dengan para Bupati di Semarang pada bulan Juli 1808. Jalan raya pos ini, yang dikenal sebagai Groote Postweg atau Grand Route de la Poste, memiliki pos-pos pergantian kuda setiap lima paal (1 paal = 1,6 km), mirip dengan layanan Pony Express di Amerika Serikat. Jalan raya ini menjadi cetak biru Pulau Jawa modern, dengan pusat-pusat industri tumbuh di sepanjang jalur tersebut.

Jalan raya pos tidak hanya mendukung mobilitas militer, tetapi juga bermanfaat dalam berbagai aspek. Jalan ini mempermudah penegakan hukum dengan mempermudah pengangkutan saksi dan tawanan, serta mendukung pengangkutan produk hasil bumi dan intensifikasi penggarapan tanah. Jalan ini juga mempercepat hubungan pos, sehingga jarak tempuh antara Batavia dan Surabaya yang sebelumnya memakan waktu 2-3 minggu dapat dipersingkat menjadi satu minggu. Hal ini menyebabkan integrasi dan penyatuan Jawa di bawah satu pusat kendali kekuasaan, yaitu Batavia. (Aman, 2014) Daendels segera memusatkan pertahanan Jawa di Batavia dengan membangun tiga benteng untuk melindungi kota dari serangan Inggris. Pertama, benteng di Ancol dengan tiga meriam di sisi kanan dan kiri yang menghadap ke pantai. Kedua, benteng di Weltevreden yang dilindungi oleh 300 meriam dan garnisun. Jika kedua benteng tersebut jebol, Daendels memiliki benteng ketiga di Meester Cornelis, dianggap sebagai benteng terkuat pada tahun 1810. Benteng di Meester Cornelis dibangun dengan perhitungan militer matang, sebagai garis pertahanan selatan Batavia dengan titik pusat di Meester Cornelis. Strategi Daendels adalah menghambat pasukan Inggris dengan mengarahkan mereka ke benteng ini. Daendels memanfaatkan tanah rawa di sekitar benteng, yang berpotensi mematikan bagi pasukan Inggris, untuk memperkuat pertahanan.

Selain di Batavia, Daendels juga membangun benteng di Gresik, Anyer (di Teluk Meeuwen), dan Yogyakarta. Di Yogyakarta, ia mengubah nama benteng Restenburg menjadi Vredenburg, menandakan peran benteng dalam melindungi dan menghormati pejabat sipil. Selain proyek pertahanan, Daendels juga mendirikan rumah sakit, barak militer, dan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Dia merekrut dan mereorganisasi pasukan militer dari bumiputera, dengan memperhatikan peningkatan gaji yang disesuaikan dengan jabatan kemiliteran. Daendels membentuk pasukan Jayasengkar dan Prangwedana yang terlatih dengan baik, serta memperkuat tentara dengan pasukan Prangwedana atau Legiun Mangkunegaran yang diresmikan sebagai satuan militer ala Grande Armee Napoleon. Pasukan

ini menjadi salah satu kekuatan modern pada awal abad ke-19. Daendels memberikan perhatian lebih besar pada penguatan tentara, yang jumlahnya mencapai delapan hingga sepuluh ribu orang, dengan campuran tentara Eropa dan penduduk pribumi. Lord Minto mengagumi besarnya instalasi militer Daendels pada saat penaklukan Jawa.

Reformasi Birokrasi dan Memberantas Korupsi

Daendels ingin memastikan bahwa pasukannya dapat dengan cepat menghadang dan mengusir pasukan Inggris dari mana pun mereka mendarat di Jawa, baik dengan infanteri, kavaleri, maupun artileri. Hendro (2014) menyatakan bahwa Sejak Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal pada awal abad ke-19, kota-kota di Jawa menjadi pusat penting dalam jaringan transportasi dan komunikasi yang mendukung kepentingan militer dan ekonomi. Pembangunan Jalan Raya Daendels, yang dikenal juga sebagai Groote Postweg, merupakan infrastruktur kunci dalam perkembangan kota modern di Jawa. Jalan Raya ini, yang juga dikenal sebagai De Groote Postweg atau Grand Route de la Poste, dilengkapi dengan pos-pos pergantian kuda yang berjarak 5 paal. (Zed, 2017) Jalan raya yang dibangun Daendels menjadi dasar bagi pengembangan infrastruktur Pulau Jawa, yang kini menjadi bagian penting dari Republik Indonesia. Pusat Mengapa disebutkan kebijakan Ia sangat tidak manusiawi dikarenakan pengupahan kepada para tenaga kerja yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya yang tertera pada perjanjian antara Penguasa-penguasa daerah dan tenaga kerja karena upah yang seharusnya sampai ketangan para tenaga kerja malah diambil beberapa persen (Korupsi) dari upah tersebut sehingga yang sampai ketangan para pekerja hanya bisa atau bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka untuk hidup. (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2019) Kasus ini merupakan salah satu lahirnya dampak buruk dari kebijakan tersebut karena perilaku tersebut menjadi kebiasaan bagi masyarakat ataupun orang-orang yang berada di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena para Penguasa-penguasa yang memelopori kebiasaan ini. Perilaku ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu melainkan ke seluruh daerah hindai belanda termasuk Sumatera dan beberapa pulau besar lainnya yang berada di Hindia-Belanda pada saat itu. Seperti contohnya Perkebunan The yang berada di pulau sumatera menjadi salah satu ajang mereka untuk melakukan hal tersebut yang dimana para pekerja mendapatkan atau bahkan tidak sama sekali hasil dari jerih payah mereka karena telah habis dipotong (Korupsi) dari Penguasa daerah pada saat itu.

KESIMPULAN

Herman Willem Daendels memiliki peran yang signifikan dalam sejarah Hindia-Belanda pada awal abad ke-19. Sebagai Gubernur Jenderal, Daendels dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur seperti Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan yang revolusioner namun juga dianggap tidak manusiawi karena masalah upah buruh yang kurang sesuai. Di bawah kepemimpinannya, Daendels menerapkan sentralisasi kekuasaan, menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan, dan membagi Jawa menjadi 23 karisidenan untuk memudahkan administrasi. Namun, kebijakan kontroversialnya dalam pembangunan jalan raya dan perlakuan terhadap buruh menimbulkan dampak negatif, seperti korupsi dalam pembayaran upah yang berdampak pada kondisi sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aman. (2014). Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai. Pujangga Press, 151.
[https://staffnew.uny.ac.id/upload/132303695/penelitian/Buku Indonesia Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme.Pdf](https://staffnew.uny.ac.id/upload/132303695/penelitian/Buku%20Indonesia%20Dari%20Kolonialisme%20Sampai%20Nasionalisme.Pdf)

- Arifin, F. (2021). Hegemoni Kolonialisme Terhadap Kekuasaan di Nusantara: Strategi Politik Daendels Meruntuhkan Kesultanan Banten Tahun 1808-1811. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.8000>
- Asian, S., & Studies, C. (1943). Mr. Herman Willem Daendels Als Gouverneur-Generaal Ter Kuste Van Guinea : I Author (S): D . A . Hoogendijk Source : De West-Indische Gids , 1943 , 25ste Jaarg . (1943) , pp . 257-266 Published by : Brill on behalf of the KITLV , Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/41847055>. 257–266.
- dan van Heutsz di Belanda, D., & Khusyairi, J. A. (2011). Memori atas Tiga Gubernur Jenderal di Hindia. 24(2), 117–129. [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/04 Johny - Monumen telah direvisi penulis mda.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/04%20Johny%20-%20Monumen%20telah%20direvisi%20penulis%20mda.pdf)
- Handinoto Handinoto. (2008). Daendels Dan Perkembangan Arsitektur Di Hindia Belanda Abad 19. DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur), 36(1), 43–53. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ars/article/view/16973>
- Jannah, N. (2024). Pengalaman Pedagang Sebagai Pihak Terdampak Proyek Pelebaran Jalan Daendels Gresik. 13(1), 71–80.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto. (2019). Sejarah Nasional Indonesia IV Kemunculan Penjajahan di Indonesia (p. 152).
- Yoel Kurniawan Raharjo. (2024). Kebijakan Pemerintahan Daendels Di Jawa 1808-1811. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 10(1), 8–15.
- Zed, M. (2017). Warisan Penjajahan Belanda Di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan Dan Kesenambungan). *Diakronika*, 17(1), 88. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/18>